

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL PRODUKSI BERAS LOKAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
EKA NURAINI LISTI
NIM. E01110087

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015

Email: ekalisti19@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya kecenderungan pada sikap implementor dalam mengimplementasikan kebijakan pemanfaatan hasil produksi beras lokal bagi PNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya sehingga belum dapat terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan beras lokal bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun berdasarkan masalah yang ada teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan model George Edward III. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran belum berjalan dengan baik, sumber daya staf yang tidak kompeten di bidangnya, disposisi atau sikap implementor tidak memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, struktur birokrasi yang dimana para implementor harus memiliki disiplin agar dapat menjalankan tugas sesuai standar yang ditetapkan. Beranjak dari hasil penelitian di atas, disarankan untuk komunikasi informasi kepada para sasaran agar lebih sering lagi dilakukan dan harus konsisten guna mengefektifkan implementasi kebijakan, dan sarana prasarana harus memadai supaya implementor lebih responsive dalam mengimplementasikan kebijakan serta diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mengenyampingkan keinginan dan kepentingan pribadi, agar tercipta keadaan yang kondusif dan lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada.

Kata-kata kunci : implementasi kebijakan, pemanfaatan, hasil produksi, beras lokal

ABSTRACT

The problem in this research is the tendency on the implementor attitude in implementing the policy of the utilization of local rice production for civil servants in the government of Kubu Raya. So it can not be done. Well, this study aims to describe the factors that influence the implementation of local rice policy for civil servants (PNS) in the Government of Kubu Raya. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. As for the existing problems based on the theory used is the theory of policy implementation model of George Edward III. Based on the results of the study found that the implementor of communication done to the target group has not gone well, staff resources are not competent in their fields, disposition or attitude implementor does not have the dedication to policies that have been established, bureaucratic structures where the implementor must have discipline in order can perform tasks according to the standards set. Moving on from the above results, it is advisable for the communication of information to the target so that more frequently performed and must be consistent in order to streamline the implementation of policies, and the infrastructure must be adequate. So, that the implementor is more responsive in implementing government policy and is expected to be able to put aside personal desires and interests in order to create conditions conducive and more attention to the interests of society with policies that already exist.

Keywords: policy implementation, utilization, production, local rice

PENDAHULUAN

Kebijakan pemanfaatan hasil produksi beras lokal bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten kubu raya merupakan langkah pemerintah untuk mensejahterakan petani dan selain itu agar bertambah minat masyarakat untuk membeli dan mengkonsumsi beras lokal maka sebagai langkah awal pemerintah mewajibkan bagi seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan kabupaten kubu raya membeli beras lokal kubu raya ini. Peraturan ini sekaligus diharapkan akan mampu untuk meningkatkan produksi pertanian, agar dapat memenuhi konsumsi beras masyarakat yang semakin meningkat dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Demi mewujudkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu mensejahterakan hidup para petani dan meningkatkan produktivitas petani itu sendiri maka pemerintah melakukan perannya untuk memasarkan produksi beras lokal ini. Langkah awal pemerintah untuk memberikan tempat dipasaran pada beras lokal di lakukan mula-mula dengan mewajibkan bagi pegawai negeri sipil untuk membeli masing-masing per/10kg dengan harga perkilogramnya Rp. 9.500-Rp. 10.000.

128.995 ton ketersediaan beras kabupaten kubu raya sebenarnya dapat

memenuhi jumlah konsumsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh pegawai negeri sipil yang di mana seorang pegawai negeri sipil diwajibkan untuk membeli 10kg beras petani produksi lokal daerah kabupaten kubu raya. Namun belum seluruh pegawai negeri sipil yang menjadi konsumen tetap dari beras petani lokal. Dari 11.766 jiwa jumlah pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan pemerintahan kabupaten kubu raya, hanya 60% dari jumlah seluruhnya yang membeli dan mengkonsumsi beras lokal kubu raya. Banyak dari instansi-instansi pemerintahan kabupaten kubu raya yang para pegawainya tidak mengetahui adanya peraturan yang mewajibkan mereka untuk membeli beras lokal. Kecanggihan teknologi agaknya belum digunakan dengan baik oleh instansi pemerintahan untuk menyebarkan informasi ataupun untuk hal lain dalam menjalin hubungan dengan instansi lain. Komunikasi langsung yang juga kurang terjalin dengan baik menimbulkan banyak masalah terdapat perkembangan informasi tentang kebijakan-kebijakan atau peraturan yang ada. SDM yang kurang kompeten pada bidangnya menimbulkan masalah pada manajemen pengelolaan keuangan pada KPRI yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemanfaatan hasil produksi beras lokal bagi pegawai negeri sipil di

lingkungan pemerintahan kabupaten kubu raya.

Maka fokus penelitian ditekankan pada factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemanfaatan hasil produksi beras local bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan kabupaten kubu raya belum terlaksana dengan baik.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemanfaatan hasil produksi beras local bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten kubu raya belum terlaksana dengan baik.

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Sumbangan tersebut khususnya dalam disiplin ilmu sosial yaitu Administrasi Negara dan ilmu lainnya yang berkaitan dengan kajian kebijakan publik khususnya tentang implementasi kebijakan pemanfaatan hasil produksi beras local bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten kubu raya. Manfaat praktis berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir dan menulis karya ilmiah untuk penulis sendiri selama mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Selain itu, dari

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah kabupaten kubu raya khususnya dalam implementasi kebijakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah berupa pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (Thomas R. Dye 2011,1 dalam nugroho, 2012:120). Edward III dan Sharkansky (dalam widodo, 2012:12) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakana dan dilakukan atau tidak dilakukan.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino,2008:145) berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variable-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Keberhasilan implementasi menurut Goggin et al (dalam Erwan dan

Dyah, 2012;89-90) sangat dipengaruhi oleh tiga hal pokok :

- isi kebijakan; merupakan sumber daya, manfaat kebijakan, serta keterlibatan publik.
- format kebijakan; terdiri dari kejelasan kebijakan, konsistensi kebijakan, serta penerimaan isi kebijakan.
- reputasi aktor; terdiri dari legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah daerah.

Edward III (dalam Agustino,2008;149) menekankan model implementasi kebijakan publiknya dengan *direct and indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremdkan oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu ;

1. Komunikasi

Diartikan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Hingga pada kelompok sasaran. Terdapat tiga dimensi komunikasi kebijakan dalam hal ini yaitu dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

2. Sumber daya

Sumber daya diklasifikasikan kedalam sumber daya staf, sumber

daya informasi, sumber daya wewenang, dan sumber daya fasilitas.

3. Disposisi

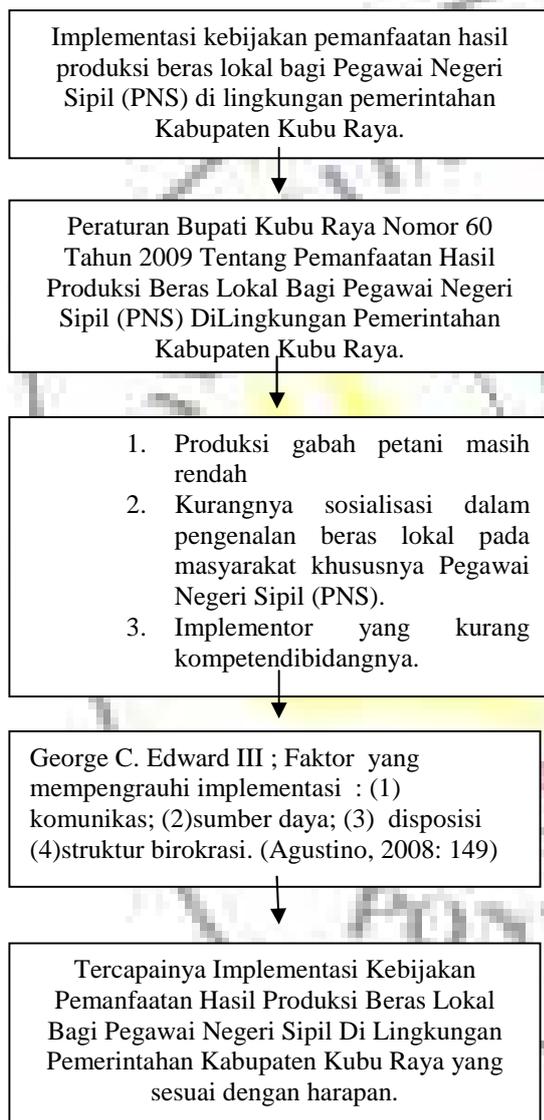
Implementasi kebijakan dapat berhasil secara efektif dan efisien, dengan hadirnya para pelaksana yang tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Terdapat dua hal pneting yang harus diperhatikan dalam disposisi yaitu ; pengangkatan birokrat dan insentif.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi dalam hal ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit-unit organisasi dengan organisasi luar serta dimensi mengenai Standar operational procedures (SOP).

Dari beberapa paparan di atas, maka teori yang penulis anggap cocok untuk melihat faktof-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemanfaatan hasil produksi beras local bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten kubu raya yang belum terlaksana dengan baik ialah teori yang

dikemukakan oleh George Edward III. Dengan alasan, penulis berusaha melakukan pengukuran kondisi atau penilaian apa yang dijadikan kriteria program/kebijakan. Berikut adalah kerangka pikir penelitian dalam penelitian ini :



METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan hal-hal yang terjadi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor serta hubungan dengan fakta dalam implementasi kebijakan pemanfaatan hasil produksi beras lokal bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya sehingga dapat diungkapkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik dan ditemukan pola-polanya sebagai wacana untuk perbaikan ke arah implementasi yang lebih baik efektif dan efisien. Tempat penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di wilayah kabupaten kubu raya. Penelitian dilakukan penulis dari bulan oktober-januari. Sedangkan waktu untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan febuari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yang diambil secara *purposive* adalah sebagai berikut: Kepala Bagian Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya, Pegawai bagian pangan dan pemasaran,

bagian sarana dan prasarana dan beberapa pegawai yang ikut menangani kebijakan pemanfaatan hasil produksi beras lokal bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Kubu Raya di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya, dan mantan pegawai Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kubu Raya, untuk penambahan informasi dilapangan, peneliti juga dibantu oleh beberapa informan, yakni dari Pegawai Negeri Sipil yang berada pada kantor Dinas yang berbeda-beda, beberapa orang dari petani yang tergabung dalam kelompok petani(GAPOKTAN), dan masyarakat umum termasuk yang bermatapencaharian sebagai petani maupun yang bukan petani. Informan tambahan ini sangat membantu peneliti dalam menguatkan informasi.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut: observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data, penulis menggunakan olahan pengolahan data melalui analisis data kualitatif. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Adapun untuk menguji validitas

data penulis menggunakan teori uji validitas dalam Putra (2011:189) yaitu Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Pelaksanaan komunikasi pada setiap instansi yang ada di wilayah kabupaten kubu raya untuk menyampaikan pesan kepada para pegawai negeri sipil tentang kebijakan yang telah ditetapkan tentang kebijakan pemanfaatan hasil produksi beras lokal bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten kubu raya belum bisa disampaikan dan tersampaiakn dengan baik kepada para sasaran kebijakan yaitu PNS dan seluruh masyarakat kabupaten kubu raya. Pengetahuan dan pemahaman kelompok sasaran yang masih minim tentang tujuan kebijakan menjadi kendala kebijakan ini untuk berhasil. Komunikasi yang dilakukan dengan tidak secara terus menerus dan merata. Komunikasi antar instansi terkait yang tidak terjalin dengan baik ikut mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kebijakan pemanfaatan hasil produksi beras lokal bagi pegawai negeri

sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten kubu raya.

2. Sumber daya

ketersediaan sumber daya baik itu sumber daya staf, informasi, wewenang, dan fasilitas yang berkaitan satu sama lain dalam pencapaian kebijakan pemanfaatan hasil produksi beras lokal bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten kubu raya. Adanya kendala pada sumberdaya fasilitas sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan proses produksi pertanian dan sumberdaya staf yang dalam pengelolaan beras lokal pada tahap berikutnya seperti yang terjadi pada koperasi pegawai kubu raya menjadi kendala dalam pencapaian kebijakan ini. Sumber daya fasilitas, khususnya kebutuhan keuangan atau dana merupakan sarana yang dibutuhkan dalam rangka mempermudah operasional implementasi kebijakan. Tentunya keadaan dimana dana yang terbatas akan mempersulit implementor dalam melaksanakan implementasi kebijakan serta staf-staf yang meneyelewengkan dan yang kurang kompeten pada bidangnya.

3. Disposisi

Berkenaan dengan faktor disposisi implementor, berdasarkan wawancara dan observasi peneliti melihat bahwa faktor disposisi implementor dalam implementasi

kebijakan pemanfaatan hasil produksi beras lokal bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten kubu rayabelum cukup memuaskan dilihat dari pengangkatan birokrat yang tidak memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, sikap implementor yang kurang sigap dalam menghadapi keluhan-keluhan petani dilapangan . Serta sikap implementor yang tidak tegas dalam menyampaikan informasi kepada kelompok sasaran.

4. Struktur birokrasi

Peneliti menilai bahwa hanya dengan standar yang telah ditetapkan tidak mampu membuat pelaksanaan sebuah kebijakan berjalan dengan lancar, tetapi juga harus didukung oleh staf-staf yang juga memiliki disiplin agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan standart yang ada. Untuk beras lokal kubu raya sendiri memiliki keunggulan dan memenuhi standar kesehatan untuk yang mengkonsumsinya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Komunikasi

Bahwa komunikasi yang dilakukan oleh implementor ternyata masih kurang efektif. Hal ini terbukti dengan hasil

wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa masih kurangnya komunikasi informasi yang dilakukan oleh implementor mengenai kebijakan pemanfaatan hasil produksi beras lokal bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya yang didukung oleh pernyataan masyarakat umum bukan PNS dan PNS sendiri. Banyak dari mereka menyatakan bahwa masih banyak diantara mereka yang tidak mengetahui adanya peraturan bupati tentang beras lokal. Hal ini disebabkan karena sarana komunikasi yang kurang menyebabkan keterlambatan kebijakan terutama pada sasaran kebijakan. Jika sosialisasi kurang efektif, maka pencapaian substansi kebijakan tidak dapat tercapai sehingga hasil dari implementasi kebijakan berbeda dengan apa yang diharapkan tidak terealisasi dengan efektif.

2) Sumber daya

Sumberdaya dalam hal ini sumber daya manusia dan fasilitas berupa dana, dalam implementasi kebijakan beras lokal bagi PNS di lingkungan pemerintahan kabupaten kubu raya kurang menunjang dalam pelaksanaan. Ketersediaan staf dan fasilitas yang tidak memadai selain menghambat implementasi secara tidak langsung juga akan menimbulkan disposisi implementor yang kurang baik.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap implementor masih ada yang kurang memperhatikan pengaduan para petani dan bahkan ada yang tidak mengetahui kebijakan beras lokal bagi PNS dengan alasan baru menjabat di instansi tersebut. Disposisi yang demikian disebabkan beberapa sumber daya yang tidak memadai sehingga menghambat akan menghambat implementasi.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang kurang kondusif cukup memberikan dampak pada keberlangsungan kebijakan. Banyak pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan beras lokal bagi PNS tentunya akan menimbulkan kurangnya tingkat koordinasi dalam pelaksanaannya dari pihak pembuat dan pelaksana suatu kebijakan.

B. Saran

- 1) Kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam menyampaikan informasi atau sosialisasi kepada sasaran kebijakan untuk lebih bisa berkoordinasi dengan intensif lagi, agar informasi tersebar dengan merata kepada seluruh masyarakat kabupaten kubu raya.
- 2) Implementor harus memiliki dan dibekali kemampuan yang kompeten

dibidangnya. Terutama untuk manajemen keuangan dalam mengatasi masalah dana yang kurang maupun cara bagaimana untuk mendapat dana tambahan. Dan perlu meningkatkan sikap agar implementor dapat menangani masalah-masalah lain yang terjadi dalam implementasi kebijakan beras lokal bagi PNS.

- 3) Untuk penelitian selanjutnya, dapat melakukan penelitian mengenai Implementasi Pemanfaatan Hasil Produksi Beras Lokal Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya dengan menambahkan variabel-variabel baru yang lebih dapat menjelaskan mengenai produksi beras lokal bagi PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.

REFERENSI

Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.

-----, 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2007 *Teori Administrasi Public*. Bandung: Alfabeta.

Purwanto, Erwan Agus., Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Putra, Nusa. 2011. *Penelitian kualitatif: Proses dan Aplikasi*. Jakarta: indeks.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Widodo, joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Sumber lain :

Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya No 60 Tahun 2009 Tentang Pemanfaatan Hasil Produksi Beras Lokal bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.

Wikipedia. 2014. Ketahanan Pangan. (online)
http://id.m.wikipedia.org/wiki/ketahanan_pangan. Diakses : 12 agustus 2014

Astro, Masuki. Mei 2015. *Luas Tanam Padi Di Banyuwangi Lebih Target*, diambil pada tanggal 03 juli 2015 dari

<http://m.antaranews.com/berita/496680/luas-tanam-padi-di-banyuwangi-lebih-target>

Pedoman Penulisan Skripsi Fisip Untan
Tahun 2011.





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Eka Nuraini Listi
 NIM / Periode lulus : E01110087 / IV
 Tanggal Lulus : Senin, 22 Juni 2015
 Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial dan Politik / IA
 E-mail address/ HP : EkaListi19@gmail.com / 082157959941

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (**):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL PRODUKSI
 BERAS LOKAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAHAN KABUPATEN KUBU RAYA

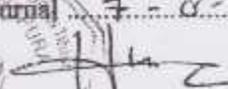
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal 7 - 8 - 2015

 Dr. Anshin, S.Sos. M. AK
 NIP. 1971.05.02.1997.021.002

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 7 Agustus 2015


 EKA NURAINI LISTI
 NIM. E01110087

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)